



Memahami **KEUANGAN** SEKTOR PUBLIK



James Jeffrio Manengkey

MEMAHAMI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

James J. Manengkey



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MEMAHAMI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Penulis:
James J. Manengkey

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 158, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-902-0

Cetakan Pertama:
Juni 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji dan syukur dinaikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulisan buku referensi ini dapat terselesaikan. Kegiatan penulisan buku referensi ini dimaksudkan untuk melengkapi materi kuliah dalam kegiatan pembelajaran bidang studi Akuntansi dan Keuangan. Sangat disadari bahwa hasil karya ini dapat diselesaikan karena bantuan baik moril atau materiil demi pelaksanaan kegiatan ini. Atas dasar itu melalui kegiatan ini saya menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung.

Dan semoga buku referensi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang Akuntansi dan Keuangan.

Tondano, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Keuangan Sektor Publik	4
1.3 Tujuan Keuangan Sektor Publik	7
1.4 Ruang Lingkup Keuangan Sektor Publik	9
1.5 Perbedaan Keuangan Sektor Publik dan Keuangan Sektor Swasta ..	13
1.6 Peran Pemerintah dalam Keuangan Publik.....	15
1.7 Isu-isu Terkini dalam Keuangan Sektor Publik.....	17
1.8 Penutup	19
Daftar Pustaka	20
BAB 2 SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA	23
2.1 Pendahuluan.....	23
2.2 Klasifikasi Penerimaan Negara.....	25
2.3 Prinsip Pengelolaan Penerimaan Negara	29
2.4 Tantangan dalam Optimalisasi Penerimaan Negara	33
2.5 Studi Kasus: Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia	36
2.6 Penutup	39
Daftar Pustaka	41
BAB 3 PENGELUARAN NEGARA.....	45
3.1 Pendahuluan.....	45
3.2 Pengertian dan Tujuan Pengeluaran Negara	47
3.3 Klasifikasi Pengeluaran Negara.....	53
3.4 Prinsip-prinsip Pengeluaran Negara	56
3.5 Jenis-Jenis Pengeluaran Negara.....	60
3.6 Dampak Pengeluaran Negara terhadap Perekonomian.....	64
3.7 Studi Kasus: Efektivitas Belanja Infrastruktur di Indonesia.....	67
3.8 Penutup	69
Daftar Pustaka	71
BAB 4 ANGGARAN NEGARA	75
4.1 Pendahuluan.....	75

4.2	Pengertian dan Fungsi Anggaran Negara	78
4.3	Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran	81
4.4	Proses Penyusunan dan Penetapan APBN.....	83
4.5	Struktur APBN	88
4.6	Jenis-Jenis Anggaran	91
4.7	Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran	93
4.8	Studi Kasus: APBN Indonesia 2024.....	97
4.9	Penutup	97
	Daftar Pustaka	100
BAB 5 KEBIJAKAN FISKAL		106
5.1	Pendahuluan.....	106
5.2	Pengertian Kebijakan Fiskal.....	109
5.3	Tujuan Kebijakan Fiskal.....	110
5.4	Instrumen Kebijakan Fiskal.....	111
5.5	Jenis-jenis Kebijakan Fiskal	112
5.6	Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal.....	113
5.7	Kebijakan Fiskal di Indonesia	117
5.8	Penutup	120
	Daftar Pustaka	122
BAB 6 UTANG PUBLIK		125
6.1	Pendahuluan.....	125
6.2	Pengertian Utang Publik.....	128
6.3	Jenis-Jenis Utang Publik.....	131
6.4	Alasan Pemerintah Mengambil Utang.....	135
6.5	Risiko dan Dampak Utang Publik	139
6.6	Indikator Kesehatan Fiskal Terkait Utang.....	142
6.7	Strategi Pengelolaan Utang Publik	145
6.8	Studi Kasus: Dinamika Utang Pemerintah Indonesia 2019– 2024.....	148
6.9	Penutup.....	150
	Daftar Pustaka	153
PROFIL PENULIS.....		158

BAB 1

PENGANTAR KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

1.1 PENDAHULUAN

Keuangan setor publik merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah memperoleh serta menggunakan sumber daya keuangan untuk menyediakan barang dan jasa. Sebagai bagian penting dari sistem perekonomian, keuangan sektor publik mencerminkan kebijakan fiskal dan anggaran negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Peran keuangan sektor publik semakin kompleks dalam konteks globalisasi, desentralisasi, dan peningkatan tuntutan transparansi serta akuntabilitas. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan dan penyeimbang dalam distribusi sumber daya.

Peran keuangan sektor publik dalam konteks globalisasi sangat krusial karena globalisasi membawa tantangan dan peluang baru bagi negara dalam mengelola perekonomian. Globalisasi telah membawa dampak besar terhadap sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, keuangan sektor publik memainkan peranan penting dalam memastikan stabilitas ekonomi, redistribusi kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Negara tidak hanya harus bersaing di pasar global, tetapi juga

harus mampu melindungi masyarakatnya dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh keterbukaan ekonomi global.

1. Stabilitas Ekonomi Makro

Keuangan sektor publik, khususnya melalui kebijakan fiskal, berperan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi global, pemerintah dapat meningkatkan belanja atau memberikan stimulus fiskal guna menjaga pertumbuhan dan lapangan kerja (Stiglitz, 2002).

Globalisasi dapat menyebabkan volatilitas ekonomi karena keterkaitan antar negara, seperti melalui aliran modal, perdagangan, dan nilai tukar. Keuangan sektor publik berperan dalam:

- a. Mengelola anggaran negara untuk menstabilkan ekonomi saat terjadi krisis global.
- b. Mengatur fiskal counter-cyclical (misalnya: meningkatkan belanja saat resesi).
- c. Menjaga defisit dan utang negara agar tetap terkendali dalam iklim persaingan global.

2. Peningkatan Daya Saing

Investasi publik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam era global. Dengan memanfaatkan anggaran negara untuk pengembangan infrastruktur dan SDM, pemerintah menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro & Smith, 2015).

Untuk bersaing secara global, negara harus memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Keuangan sektor publik berperan dalam:

- a. Pembiayaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, internet, energi).
- b. Investasi dalam pendidikan, riset, dan kesehatan.
- c. Memberikan insentif fiskal bagi sektor strategis dan industri ekspor.

3. Redistribusi Pendapatan

Globalisasi sering kali memperlebar kesenjangan pendapatan. Melalui sistem perpajakan progresif dan belanja sosial, keuangan sektor publik dapat mengurangi ketimpangan dan memastikan inklusivitas ekonomi

(Atkinson, 2015). Peran negara dalam memberikan subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial menjadi krusial untuk menjaga kohesi sosial. Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Keuangan sektor publik penting untuk:

- a. Menyediakan program jaminan sosial, subsidi, dan bantuan sosial.
- b. Mengatur sistem perpajakan progresif untuk mendanai redistribusi pendapatan.
- c. Melindungi kelompok rentan dari dampak liberalisasi perdagangan atau investasi asing.

4. Kedaulatan Fiskal dan Regulasi

Dalam menghadapi tekanan dari pasar internasional dan perusahaan multinasional, negara harus menjaga kedaulatan fiskalnya. Hal ini termasuk mengatasi penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi keuangan publik melalui kerja sama internasional seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang digagas oleh OECD (OECD, 2021).

Globalisasi menantang kedaulatan negara karena adanya tekanan dari pasar internasional dan perusahaan multinasional. Peran keuangan sektor publik termasuk:

- a. Membuat kebijakan fiskal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
- b. Menutup celah penghindaran pajak oleh korporasi global.
- c. Berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk perpajakan yang adil (misalnya melalui OECD/G20 BEPS).

5. Pembangunan Berkelanjutan

Keuangan publik juga memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk energi terbarukan, pendidikan hijau, dan program adaptasi perubahan iklim (UNDP, 2020).

Dalam era globalisasi, keuangan sektor publik harus diarahkan untuk:

- a. Mendanai program pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- b. Meningkatkan efisiensi anggaran dan tata kelola pemerintahan (good governance).
- c. Menarik pembiayaan internasional (green bonds, bantuan luar negeri) tanpa membebani masa depan.

BAB 2

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA

2.1 PENDAHULUAN

Penerimaan negara memiliki peran vital dalam pembangunan nasional karena menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti penyediaan infrastruktur, layanan publik, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa penerimaan yang memadai, negara akan kesulitan melaksanakan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai struktur, karakteristik, dan dinamika sumber-sumber penerimaan negara menjadi hal yang sangat penting dalam konteks perencanaan fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan (Basri, 2020).

Secara umum, sumber penerimaan negara dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan meliputi berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak ekspor dan impor. Pajak ini merupakan kontributor utama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, PNBP mencakup pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, keuntungan dari Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), penerimaan dari jasa layanan pemerintah, serta sumber-sumber lainnya seperti denda dan lelang (Sari, 2019).

Dalam konteks Indonesia, penerimaan perpajakan secara konsisten menyumbang lebih dari 70% terhadap total penerimaan negara selama satu dekade terakhir. Namun, tantangan dalam pengumpulan pajak masih cukup besar, di antaranya adalah kepatuhan pajak yang rendah, basis pajak yang sempit, dan tingginya tingkat ekonomi informal. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dunia seperti minyak, batu bara, dan kelapa sawit juga berdampak pada ketidakstabilan penerimaan dari sektor sumber daya alam yang merupakan komponen utama dalam PNBP (Pratama & Suryani, 2017).

Reformasi perpajakan menjadi langkah strategis yang terus didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem pajak. Misalnya, melalui penguatan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pembaruan undang-undang perpajakan untuk menyesuaikan dengan praktik global (Yusuf & Prasetyo, 2022). Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga menjadi agenda penting, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun non-pajak. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan kontraksi pada basis pajak dan menurunkan pendapatan dari sektor-sektor produktif. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja dan insentif pajak, yang pada gilirannya menyebabkan defisit anggaran yang cukup besar (Kementerian Keuangan RI, 2021). Situasi ini menegaskan pentingnya diversifikasi sumber penerimaan negara serta penguatan sistem fiskal agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan dinamika tersebut, pengelolaan penerimaan negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Kebijakan fiskal perlu dirancang untuk tidak hanya mengejar penerimaan maksimal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, distribusi pendapatan yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap komponen-komponen sumber penerimaan negara, termasuk

tren dan tantangannya, menjadi sangat relevan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan global dan domestik.

2.2 KLASIFIKASI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan negara merupakan fondasi utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, struktur penerimaan negara diklasifikasikan secara umum ke dalam dua kategori besar, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keduanya berperan sentral dalam mendukung pengeluaran negara untuk penyediaan barang publik, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya.

Pentingnya pemahaman mengenai klasifikasi penerimaan negara terletak pada kemampuannya untuk mencerminkan kondisi fiskal suatu negara. Pemerintah yang mampu mengelola penerimaannya dengan efektif akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menggerakkan perekonomian dan mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, klasifikasi dan struktur penerimaan negara perlu dikaji secara sistematis, termasuk bagaimana kebijakan fiskal dapat menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika ekonomi global dan domestik.

Penerimaan negara terbagi menjadi dua kategori besar:

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan ini mencakup semua pendapatan negara yang diperoleh dari pungutan wajib kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung. Komponen utama penerimaan perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Masuk serta Bea Keluar.

Menurut Bayari et al. (2023), kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara mencapai lebih dari 75% dalam dekade terakhir. Meski demikian, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara berkembang, yang menunjukkan potensi fiskal belum tergarap secara optimal.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP berasal dari sumber selain pajak, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, keuntungan BUMN, jasa pelayanan pemerintah, denda dan sanksi administratif, serta penerimaan lainnya. Pulungan et al.

BAB 3

PENGELUARAN NEGARA

3.1 PENDAHULUAN

Pengeluaran negara merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan publik. Pengeluaran negara tidak hanya mencakup biaya operasional pemerintah seperti gaji pegawai dan administrasi, tetapi juga pengeluaran pembangunan yang berfokus pada investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Fungsi utama pengeluaran negara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta mengatasi berbagai masalah ekonomi makro seperti pengangguran dan inflasi (Deleidi, Mazzucato, & Ciaffi, 2024).

Dalam lima tahun terakhir, dinamika pengeluaran negara menjadi sangat menarik untuk dipelajari karena adanya beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pola dan efektivitasnya. Salah satu faktor eksternal terbesar adalah pandemi COVID-19 yang mengguncang sistem ekonomi global dan memaksa hampir seluruh negara meningkatkan pengeluaran publik untuk menangani krisis kesehatan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan (Kose, Sugawara, & Terrones, 2022). Negara-negara di seluruh dunia mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk memperkuat sistem kesehatan, memberikan bantuan sosial, serta mendukung pelaku usaha yang terdampak pandemi. Akibatnya, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan, yang

menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan fiskal dan keberlanjutan utang negara.

Selain pandemi, perubahan geopolitik global, termasuk konflik regional dan ketegangan perdagangan internasional, juga berdampak pada pengeluaran negara, terutama dalam sektor pertahanan dan keamanan. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyusunan anggaran negara serta alokasi pengeluaran yang harus mempertimbangkan prioritas pembangunan dan stabilitas nasional (Le et al., 2023).

Selain itu, negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengelola pengeluaran publik karena keterbatasan sumber daya fiskal dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Pengeluaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi prioritas utama, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran (Al Mamun & Rahim, 2025). Kesenjangan kapasitas fiskal antara negara maju dan berkembang juga mencerminkan perbedaan strategi dan tantangan dalam pengelolaan pengeluaran negara.

Berbagai penelitian akademik dalam lima tahun terakhir telah banyak membahas pengeluaran negara dari berbagai sudut pandang. Deleidi, Mazzucato, dan Ciaffi (2024) meneliti efek pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD dan menemukan bahwa pengeluaran investasi publik memiliki multiplier fiskal yang signifikan, terutama dalam mendorong output ekonomi selama periode resesi. Hal ini menegaskan pentingnya alokasi pengeluaran yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Penelitian oleh Al Mamun dan Rahim (2025) membandingkan efisiensi pengeluaran sosial di India, Pakistan, dan Bangladesh, mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan secara positif mempengaruhi pembangunan manusia dalam jangka pendek, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola anggaran.

Pandemi COVID-19 juga menjadi titik fokus banyak studi. Kose, Sugawara, dan Terrones (2022) mengkaji respons fiskal global terhadap pandemi dan menyimpulkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah meningkat tajam, ada risiko signifikan terkait dengan lonjakan utang dan

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A. (2025). Determinants of the degree of fiscal sustainability. *International Journal of Finance & Economics*.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2960>
- Afonso, A. (2025). Public debt and fiscal sustainability: Evidence from the euro area. *Journal of Macroeconomics*, 65, 103-118.
- Agha, S. E., & Dehghani, S. (2023). Green Sukuk: Innovation in Islamic Public Debt Instruments. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(1), 72-88. <https://doi.org/10.1080/20430795.2022.2046114>
- Al-Bassam, W. (2021). Public Debt and Economic Growth: An Empirical Analysis. *Journal of Economic Studies*, 48(3), 567-589.
<https://doi.org/10.1108/JES-05-2020-0267>
- Ali, M., & Hassan, R. (2021). The Potential of Sukuk in Public Debt Management: Evidence from Muslim Countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 233-251.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0440>
- Anwar, M. (2022). Mekanisme Pengelolaan Utang Negara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Fiskal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.
- Arezki, R., & Sy, A. (2021). Sovereign debt and market confidence: lessons from emerging markets. *IMF Working Paper*.
<https://doi.org/10.5089/9781513572109.001>
- Augustine, D., & Rafi, M. (2023). Does Public Debt Encourage Economic Growth? An Application of Quantile Regression Approach. *Economies*, 13(4), 113. <https://doi.org/10.3390/economies13040113>
- Bachmair, F., & Di Bella, G. (2021). Fiscal Dependence on Foreign Aid and Debt Vulnerability. *IMF Working Paper*.
<https://doi.org/10.5089/9781513582320.001>
- Blanchard, O. (2019). Public Debt and Low Interest Rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229.
<https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>

PROFIL PENULIS

James Jeffrio Manengkey, SE., Ak., DEA., MSA., CRA., CIAS

Sejak Tahun 2005 menjadi Dosen Tetap Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Penulis mengajar berbagai mata kuliah terkait Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Risiko, Statistika, Metodologi Penelitian, dan Etika Bisnis.

Gelar Sarjana Akuntansi diperoleh penulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia Bandung (2001). Gelar Master Degree Diplôme d'Études Approfondies di Bidang Economic Intelligence diperoleh penulis dari Universitas Aix-Marseille France (2003). Gelar Magister Sains Akuntansi diperoleh penulis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2011).

Memahami **KEUANGAN** SEKTOR PUBLIK

Buku Memahami Keuangan Sektor Publik ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami dinamika keuangan yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan pendekatan sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menghadirkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana negara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan uang publik demi kepentingan masyarakat.

Materi dalam buku ini mencakup dasar-dasar teori keuangan publik, fungsi dan peran anggaran negara, prinsip-prinsip pengeluaran dan penyusunan anggaran, hingga pembahasan strategis mengenai kebijakan fiskal dan utang publik. Setiap bab dilengkapi dengan contoh kasus aktual di Indonesia yang membantu mahasiswa mengaitkan konsep teoritis dengan praktik kebijakan ekonomi yang nyata.

Buku ini juga mendorong pembaca untuk bersikap kritis terhadap isu-isu kontemporer seperti transparansi fiskal, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan utang negara. Dengan demikian, buku ini bukan hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar, tetapi juga melatih kepekaan akademik dan praktis terhadap keuangan negara dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik.

Disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di perguruan tinggi, buku ini sangat sesuai digunakan dalam perkuliahan mata kuliah Keuangan Publik, Ekonomi Fiskal, atau Manajemen Anggaran Pemerintah. Buku ini juga relevan bagi calon aparatur sipil negara, pengelola anggaran, dan siapa pun yang ingin memahami bagaimana uang negara bekerja untuk rakyat.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

